

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis”*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)
- Bahtiar Effendie, *et.all, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996)
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan ke-2*, (Bandung: PT Alumni, 2013)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983)
- G.H.S.Lumban Tobing, *“Peraturan Jabatan Notaris”*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1992)
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT.Refika Aditama, Juni 2011)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan: Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arkola, 2003)

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, Juli 2006)
- Kartini Soefjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang berpotensi Konflik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998)
- Munir Fuady, *Profesi Mulia "Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Central for Documents and Studies of Business Law, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Philipus M. Hadjon, *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonseia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2011)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Syarifuddin Petanasse, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007)

Syaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

JURNAL

Abdul Ghofur Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia", *Jurnal Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2009

Arisaputra, "Kewajiban Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Persepektif*, Vol. XVII No.3, 2012

Deviana Yuanitasari, "Peran Notaris Publik dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kontrak Standar untuk Konsumen Indonesia", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, Issue 2, 2017

Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No.1, Maret, 2017

Hari Purwadi dan Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni 2015

Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 3, Edisi September, 2012

Nanda Ika Puspita, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Mengambil Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam Rangka Proses Peradilan", *Jurnal Ilmiah Repertorium*, Vol. 2, 2016

Prasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Volume 3 No. 4, Desember, 2016

Rahmida Erliyani, *et.all*, “Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5, 2021

HASIL PENELITIAN

A. Hamid S. Atamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Jakarta: Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990

Safna Tamiya, “Pengaturan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris Untuk Proses Peradilan”. *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku ke-3 dan 4)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 3 Februari 2016

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 467/PDT/2016/PT BDG tanggal 22 Desember 2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1681/K/Pdt/2017 tanggal 16 Agustus 2017

WEBSITE

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”.
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Sudikno_Mertokusumo, diakses pada 14 Maret 2023

KAMUS

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ingkar>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ruliff Lumban Tobing, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Notaris Ruliff Lumban Tobing, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Tanggal 28 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB

